

## Analisa *Payoff Chicken Game Theory* Terkait Kebijakan Penyebaran THAAD di Korea Selatan

Nibras Fadhlillah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia nibras.fadhlillah@fisip.unila.ac.id

### Abstrak

Konflik Semenanjung Korea menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang ada sampai dengan saat ini. Korea Utara terus mengembangkan teknologi senjata nuklirnya, disertai dengan upaya agresif uji coba peluncuran yang terus menerus dilakukan. Di sisi lain, dalam menghadapi provokasi dan agresivitas Korea Utara, Korea Selatan perlu untuk membuat keputusan yang paling memungkinkan dan menguntungkan bagi keamanan nasional negaranya didasarkan pada perhitungan kemungkinan pay off dalam *Chicken Game Theory*. Artikel ini diharapkan dapat menjelaskan sikap Korea Selatan terkait penyebaran Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) melalui penggunaan analisa *chicken game theory* sebagai upayanya dalam mencegah serangan senjata nuklir Korea Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan desk-research atau library-research sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dengan konflik semenanjung korea yang dilihat sebagai suatu permainan dimana kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada suatu negara adalah situasi DD, yang berartikan pecahnya kembali Perang Korea. Namun, apabila melihat situasi dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara – Korea Utara dan Korea Selatan – mengalah (C) bukan menjadi pilihan yang lebih baik buat mereka dibandingkan perang. Oleh karena itu, kedua belah pihak negara, sampai dengan saat ini terus bersiaga dengan meningkatkan sistem pertahanan dan militer masing-masing negaranya.

**Kata Kunci:** *Chicken Game Theory*, Konflik Semenanjung Korea, THAAD

### Abstract

The Korean Peninsula conflict is part of the remnants of the cold war that still exists. North Korea continues to develop its nuclear weapons technology, accompanied by aggressive efforts to launch its nuclear trials continuously. On the other hand, in the face of North Korea's provocation and aggressiveness, South Korea needs to make the most probable and profitable decisions for the country's national security based on the calculation of the possible payoff in the *Chicken Game Theory*. This article is expected to explain South Korea's stance regarding deploying the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) through the use of *chicken game theory* analysis to prevent North Korea's nuclear weapons attack. The research method used in this article is a descriptive qualitative method with desk research or library research as the data collection technique in this study. The Korean peninsula conflict is seen as a game where a DD situation is the worst possible to happen to a country, which means a re-breaking of the Korean War. However, if we look at the situation and the actions taken by each country – North Korea and South Korea – giving in (C) is not a better choice for them than war. Therefore, both sides of the country until now continue to be on the alert by improving each country's defence and military systems.

**Keywords:** *Chicken Game Theory*, THAAD, The Korean Peninsula Conflict

## Pendahuluan

Salah satu sisa dampak Perang Dingin, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang masih terlihat sampai dengan saat ini adalah konflik Semenanjung Korea. Konflik yang dimulai sejak pecahnya Perang Korea pada 25 Juni 1950 ini masih meninggalkan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak negara – Korea Utara dan Korea Selatan. Berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953 tidak menjadikan konflik antar kedua negara tersebut berakhir (Calder, 1996). Berbagai usaha perundingan damai telah dilakukan oleh kedua negara, namun pada akhirnya selalu berakhir dengan kegagalan dan tidak memberikan hasil yang signifikan. Kegagalan perundingan damai ini seringkali disebabkan oleh sikap provokasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara dengan pembangunan dan uji coba peluncuran senjata nuklirnya.

Pembangunan senjata nuklir di Korea Utara dipandang menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur, khususnya keamanan nasional Korea Selatan (Calder, 1996). Korea Utara tercatat memiliki setidaknya 60 hulu ledak nuklir pada tahun 2021 (Davis, 2021). Sejak pembangunan senjata nuklirnya di tahun 1965, Korea Utara telah tercatat beberapa kali melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir, yaitu pada Oktober 2006, Mei 2009, Februari 2013, Januari dan September 2016; serta pada Juli 2017 (Aljazeera, 2021). Korea Utara bahkan menghabiskan setidaknya USD 4 milyar setiap tahunnya atau setara dengan 24 persen GDP negara untuk pengembangan program misil dan nuklirnya (Lee, 2017). Tidak hanya itu, upaya perundingan enam pihak (*Six-Party Talks*) pada Juni 2003, yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dengan melibatkan China, Jepang, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan terkait dengan pembahasan nuklir Korea Utara, juga tidak memberikan hasil yang signifikan dalam mencegah pembangunan senjata nuklir di Korea Utara (Moore, 2008).

Sikap *offensive* pemerintah Korea Utara yang terus melakukan pengembangan dan uji coba peluncuran senjata nuklir, dipandang menjadi salah satu faktor krusial yang membuat hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan cukup dinamis. Selama beberapa tahun terakhir dapat terlihat upaya keras kedua belah pihak negara untuk memperbaiki hubungan dan berdamai. Dapat terlihat pada tahun 2018 dalam pertemuan *North and South Korea Summit*, Presiden Korea Selatan – Moon Jae-in, dan Presiden Korea Utara – Kim Jong Un, untuk pertama kalinya bertemu dan sepakat untuk mendorong adanya upaya perdamaian (Berlinger & Seo, 2018). Bahkan, pada tahun 2021, Pemerintah Korea Utara dan Korea Selatan pernah bersepakat secara “*in principle*” untuk mengakhiri perang yang telah berjalan selama kurang lebih 70 tahun dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi (Forbes, 2021). Salah satunya adalah penarikan tentara-tentara Amerika Serikat yang ada di wilayah Korea Selatan.

Selama kurang lebih 70 tahun konflik Semenanjung Korea berlangsung, Amerika Serikat telah menjadi partner kerjasama Korea Selatan dalam menjaga keamanan nasional. Dalam menanggapi pembangunan dan uji coba peluncuran senjata nuklir yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara selama ini, pemerintah Korea Selatan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang keamanan militer (*Mutual Defense Treaty*) dengan Amerika Serikat (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Bahkan, hubungan kerjasama militer antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang telah terbangun sejak tahun 1953 ini kembali diperkuat pada tahun 2009 melalui *The Obama-Lee Summit “Joint Vision for the Alliance”* yang menjanjikan akan peningkatan dan perluasan kerjasama pertahanan antar kedua belah negara di masa depan (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010) Dalam pertemuan ini juga, pemerintah Amerika Serikat – Presiden Obama – dan pemerintah Korea Selatan – Presiden Lee

Myung Bak – sepakat untuk mengadopsi kebijakan “*Strategic Patience*” yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu:

1. Menolak untuk kembali memulai Perundingan Enam Pihak (*Six-Party Talks*) tanpa adanya jaminan akan Korea Utara untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam denuklirisasi di wilayahnya
2. Berusaha untuk mengubah penilaian strategis China terhadap Korea Utara
3. Menggunakan provokasi Pyeongyang sebagai kesempatan untuk memperketat sanksi

Sebanyak 28.500 pasukan tentara Amerika Serikat telah ditempatkan di wilayah Korea Selatan sebagai bantuan dalam menjaga keamanan dari ancaman militer Korea Utara (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Pemerintah Amerika Serikat juga memasukkan Korea Selatan ke dalam “*Nuclear Umbrella*”, yang juga dikenal sebagai “*Extended Deterrence*” atau perjanjian perlindungan terhadap negara-negara non-nuklir sekutu Amerika Serikat.

Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk membangun “*principle of antimissile operation*” dan semakin mengintensifkan kegiatan pelatihan militer bersama (Seok-Jong, 2016). Melalui kerjasama keamanan dan pertahanan nasional ini, Amerika Serikat juga mendesak Korea Selatan untuk dapat mengembangkan kemampuan *Ballistic Missiles Defense* (BMD)-nya ke dalam tingkatan yang lebih canggih dan mengintegrasikannya ke dalam sistem BMD yang dimiliki Amerika Serikat dan sekutu (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Tidak hanya itu, termasuk didalamnya juga adalah usulan untuk penyebaran sistem *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) – salah satu bagian dalam sistem BMD Amerika Serikat – sebagai upaya dalam mencegah serangan rudal balistik Korea Utara (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010).

Pemerintah Korea Selatan, pada awalnya, bersikap resistan terhadap konsep integrasi BMD yang diusulkan oleh Amerika Serikat (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Selatan tidak ingin mengganggu China, yang sejak awal tidak menyetujui usulan penyebaran THAAD di Korea Selatan, dan ketidakinginan pemerintah Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Jepang karena adanya hubungan buruk yang terjalin diantara kedua negara terkait dengan isu sejarah dan konflik wilayah. Namun, sikap provokatif Korea Utara, yang kembali melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir ke-empat miliknya pada Januari 2016 dan disusul dengan peluncuran roket sebulan kemudian, membuat pemerintah Korea Selatan, pada akhirnya, memutuskan untuk menerapkan kebijakan penyebaran sistem THAAD sebagai upaya pencegahan dalam serangan senjata nuklir Korea Utara (Chul-Hwan, 2016).

Namun, keputusan pemerintah Korea Selatan untuk menerapkan kebijakan penyebaran THAAD tersebut mendapatkan reaksi negatif dari berbagai pihak, baik itu dari dalam negeri maupun dari negara-negara lain, seperti China dan Rusia (Reuters, 2016). China memandang bahwa penyebaran sistem THAAD di Korea Selatan hanya dijadikan alat oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, yaitu untuk memonitoring gerak-gerik China, meningkatkan kapabilitas militer Amerika Serikat terhadap senjata strategis China, dan merusak keseimbangan strategis di kawasan Asia (Sankaran, 2017). Berdasarkan pada penilaian tersebut, pemerintahan China mulai mengambil langkah-langkah balasan sebagai responnya dalam mengkritisi kebijakan penyebaran THAAD, seperti mencabut izin visa wisatawan Korea Selatan dan membatasi secara ketat industri hiburan Korea Selatan di pasar China (Haenle & Sherman, 2016).

Sama halnya dengan China, sejak awal diputuskannya penyebaran THAAD oleh pemerintah Korea Selatan, banyak masyarakat Korea Selatan yang memandang negatif keputusan tersebut dan mengajukan protes agar dibatalkannya kebijakan tersebut. Masyarakat Korea memandang penyebaran THAAD tidak akan membantu dalam menjaga keamanan dalam negeri, melainkan hanya melindungi wilayah basis-basis tentara Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan. (Sukjoon, *The Diplomat: Asia Defense*, 2021). Banyak kritik yang mengatakan bahwa penempatan sistem THAAD yang berada di Desa Seongsan, Provinsi Gyeongsang Utara ini jauh dari perbatasan antar Korea yang mengartikan bahwa sistem THAAD tersebut tidak akan dapat melindungi Seoul dan wilayah ibu kota (Sukjoon, *The Diplomat: Asia Defense*, 2021). Ditambah lagi, keputusan tersebut dipandang hanya akan memperkeruh konflik yang telah terjadi dan hanya akan menjadikan Korea Selatan sebagai target ancaman militer.

Berdasarkan analisa latar belakang permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu berkaitan dengan alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan mengambil kebijakan penyebaran *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di tahun 2016. Artikel ini diharapkan dapat menjelaskan sikap Korea Selatan terkait penyebaran *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) melalui penggunaan analisa *chicken game theory* sebagai upayanya dalam mencegah serangan senjata nuklir Korea Utara. Secara lebih umum, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan pengambilan sikap negara dalam melakukan kerjasama ataupun perang dalam sebuah konflik internasional, termasuk memahami kemungkinan hasil yang terjadi dari kerjasama ataupun perang tersebut.

## Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggali secara lebih mendalam fenomena sosial tertentu melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan metode *desk-research* atau *library-research*. Penelitian ini akan menjelaskan latar belakang maupun alasan dari pemerintah Korea Selatan dalam kebijakan penyebaran THAAD meskipun mendapatkan banyak kritik baik di tingkat domestic maupun oleh beberapa negara lainnya. Hasil analisa dan temuan dalam artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait sikap negara dalam *policy decision making process*, khususnya keterkaitannya dengan keamanan nasional.

## Hasil dan Pembahasan

Korea Utara dan Korea Selatan, pada awalnya, merupakan satu kesatuan dalam Semenanjung Korea, sebelum terjadinya Perang Korea pada tahun 1950 karena adanya konflik perbedaan ideologi dan perbatasan wilayah, yang kemudian memecahkan Semenanjung Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Selatan. Bersama dengan Iran dan Iraq, Korea Utara menjadi salah satu negara yang termasuk di dalam "*The Axis of Evil*", seperti yang disebutkan oleh George W. Bush dalam pidatonya di tahun 2002. Sebagai salah satu negara pengembang senjata nuklir di dunia, Korea Utara dipandang sebagai ancaman bagi banyak negara di dunia, khususnya Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dengan kemampuan perekonomian negaranya yang terbilang cukup rendah, Bush menuduh Korea Utara, bersama dua negara *axis of evil* lainnya, secara sengaja membuat warga negaranya kelaparan hanya untuk pengembangan senjata nuklir atau *Mass Destructive Weapons* (MDW) dan menempatkan ancaman terhadap keamanan global (Harris, 2015).

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini telah dimulai sejak tahun 1965 dengan bantuan dari Uni Soviet dalam pendirian pusat penelitian pengembangan senjata nuklir di Yongbyon (John, 2005). Pada Februari 2005, secara terbuka, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara – Kim Gye Gwan, mengungkapkan bahwa Korea Utara memiliki beberapa bom di dalam negerinya dan berencana untuk membangun lebih banyak lagi di kemudian hari. Kim Gye Gwan juga menambahkan bahwa pengembangan dan pembangunan senjata nuklir Korea Utara ini merupakan upaya *self-defense* Korea Utara dari serangan negara-negara lain (Nikitin, 2013).

Dengan semakin intensifnya pengembangan senjata nuklir Korea Utara, Korea Selatan memandang hal ini sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Meskipun pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa pengembangan senjata nuklirnya tersebut hanya dimaksudkan sebagai pertahanan keamanan negaranya saja, namun hal tersebut tetap dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara sekitar, khususnya Korea Selatan (IISS, 2016). Hal ini dikarenakan tidak ada yang dapat memastikan tindakan yang akan dilakukan Korea Utara di kemudian hari – baik itu Korea Utara akan terus melakukan pengembangan senjata nuklir dan melakukan penyerangan ataupun sebaliknya. Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, Korea Selatan juga harus mampu dalam membuat keputusan – baik itu mengalah terhadap Korea Utara ataupun melakukan konfrontasi terhadap Korea Utara – yang paling memungkinkan dan menguntungkan bagi keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, keputusan pemerintah Korea Selatan dalam kebijakan penyebaran sistem THAAD, dengan bantuan dari Amerika Serikat, merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan keamanan nasionalnya dari ancaman serangan senjata nuklir maupun rudal Korea Utara. Namun permasalahan lainnya muncul ketika kebijakan penyebaran THAAD ini dipandang berbeda oleh China dan bahkan oleh masyarakat Korea Selatannya sendiri. Ditambah lagi meskipun mendapat respon negatif yang cukup besar dari China maupun warga negaranya, pemerintah Korea Selatan tetap beraliansi dengan Amerika Serikat dan menjalankan kebijakan penyebaran sistem THAAD milik Amerika Serikat tersebut.

Untuk menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pemerintah Korea Selatan dalam melakukan penyebaran THAAD tersebut, penulis akan menggunakan *Chicken Game Theory* milik Randall W. Stone. Melalui matriks permainan yang menjadi asumsi dasar dalam *Chicken Game Theory*, hal ini akan dapat membantu penulis untuk melihat probabilitas tolak ukur keuntungan dan kerugian yang bisa didapatkan suatu negara dalam memutuskan suatu tindakan bekerjasama atau tidak. Dengan begitu penulis akan mendapatkan gambaran apa yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi pemerintah Korea Selatan untuk melakukan penyebaran THAAD, meskipun mendapat banyak respon negatif, baik itu dari dalam maupun luar negeri.

Pada dasarnya, *chicken game theory* merupakan teori turunan dalam *game theory* yang melibatkan dua aktor dalam memilih untuk melakukan kerjasama (berdamai) atau berperang. Randall W. Stone dalam tulisannya yang berjudul “*The Use and Abuse of Game Theory in International Relation*” mengatakan bahwa *chicken game theory* biasanya digunakan untuk menganalisa *crisis bargaining*, dimana situasi tawar menawar antar kedua negara sudah semakin sulit dilakukan (Stone, 2001). Secara lebih terperinci, Randall juga menjelaskan bahwa matriks permainan dalam *chicken game theory* ini menyajikan permainan dalam bentuk normal dimana hasilnya ditentukan oleh pilihan simultan untuk melakukan penyimpangan (C) atau tidak menyimpang (D) oleh masing-masing pemain. Dengan kata lain C dalam *Chicken Game Theory* ini dapat direpresentasikan sebagai “*Cooperate*”, sedangkan D merepresentasikan “*Defect*”. Adapun urutan *pay off* (hasil) yang didapatkan ketika masing-masing aktor menentukan pilihannya, yaitu (Stone, 2001):

1. Jika pemain melakukan *Defect* dan pemain lainnya melakukan *Cooperate* (DC)
2. Jika kedua pemain sama-sama melakukan *Cooperate* (CC)
3. Jika pemain lainnya melakukan *Defect* dan pemain melakukan *Cooperate* (CD)
4. Jika kedua pemain sama-sama melakukan *Defect* (DD)

Seperti yang telah dijelaskan dalam sebelumnya bahwa kemungkina *pay off* terburuk yang dapat terjadi dalam *Chicken Game Theory* adalah situasi dimana ketika kedua pemain sama-sama tidak melakukan penyimpangan (DD), sedangkan kemungkinan *pay off* terbaik adalah ketika pemain melakukan penyimpangan dan pemain lainnya tidak melakukan penyimpangan (DC). Secara lebih spesifik, hal ini dapat terlihat dari bagan operasionalisasi dari *Chicken Game Theory*, yaitu:

	C	D
C	3,3	2,4
D	4,2	1,1

**Tabel 1. Bagan Operasionalisasi *Chicken Game Theory***

Sumber: Randall W Stone, 2001

Secara lebih sederhana, urutan *pay off* terbaik hingga terburuk bagi suatu negara pengambil keputusan dalam *Chicken Game Theory* dapat digambarkan seperti:

**DC > CC > CD > DD**

Apabila diaplikasikan dalam studi kasus konflik Semenanjung Korea, secara lebih khusus pada konflik kebijakan penyebaran THAAD oleh Pemerintah Korea Selatan, dapat terlihat bahwa model analisa yang akan digunakan, yaitu:

	Korea Selatan (C)	Korea Selatan (D)
Korea Utara (C)	Damai	Kemenangan Korea Selatan
Korea Utara (D)	Kemenangan Korea Utara	Perang

**Tabel 2. Bagan Operasionalisasi *Chicken Game Theory* pada Studi Kasus**

Secara lebih mendalam, model analisa juga dapat digambarkan, seperti:

**Kemenangan Korea Selatan > Damai > Kemenangan Korea Utara > Perang**

Sehingga dapat dilihat apabila didasarkan pada perhitungan hasil *pay off* dalam *Chicken Game Theory*, hasil terbaik yang bisa didapatkan Korea Selatan adalah kemenangannya atas Korea Utara, dimana Korea Utara bekerjasama dengan menyetujui dilakukannya denuklirisasi dan bergabung dengan Korea Selatan dalam penyatuan wilayah (DC). Sedangkan hasil terbaik kedua yang bisa didapatkan oleh Korea Selatan adalah situasi CC dimana kedua belah pihak negara sama-sama mengalah dan setuju untuk berdamai.

#### a. Analisa kemungkinan *pay off* DC dan CC

Analisa kemungkinan *payoff* DC akan sangat berkaitan dengan perspektif kaum realis. Dalam perspektif kaum realis, mendapatkan kekuasaan, kemenangan negara dan keamanan nasional tentu menjadi prioritas utama setiap negara di dunia. Tidak terkecuali dalam konflik semenanjung korea antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan sifat dasar setiap negara yang *greedy* atas kekuasaan dan kemenangan, negara secara otomatis akan memilih sebuah pilihan dimana ia akan memenangkan permainan tersebut. Hal ini juga diterapkan di dalam asumsi dasar urutan *pay off* pada *Chicken Game Theory*, dimana *pay off* terbaik yang bisa didapatkan oleh negara adalah situasi DC.

Apabila melihat konflik semenanjung korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang tidak juga membaik sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, *cooperate* atau mengalah terhadap negara lainya bukan menjadi pilihan prioritas bagi kedua negara, terlebih lagi bagi Korea Utara, meskipun adanya komitmen mendorong terciptanya perjanjian damai dari kedua belah pihak negara. Salah satu contoh kegagalan perundingan damai antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah ketidakefektifan inisiatif *Six Party Talks* dalam menyelesaikan permasalahan denuklirisasi Korea Utara. Pada tahun 2006, inisiatif *Six Party Talks*, yang sempat mencapai sebuah kesepakatan, harus kembali menghadapi *deadlock* ketika Korea Utara melakukan uji coba terhadap perangkat nuklir dan senjata rudal miliknya (Moore, 2008). Hal ini semakin diperburuk dengan keputusan pemerintah Korea Utara untuk mundur dari inisiatif *Six Party Talks* pada tahun 2009.

Sikap provokatif Korea Utara juga dapat terlihat dalam kasus tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan, *The Cheonan* pada tahun 2010 (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Melalui investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi multinasional, yang diketuai oleh Korea Selatan, diketahui bahwa tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan ini merupakan hasil perbuatan dari kapal selam milik Korea Utara (Manyin & Chanlett-Avery, US-South Korea Relations, 2010). Masih di tahun yang sama pada 23 November, beberapa hari setelah diketahuinya usaha pengayaan uranium Korea Utara, Korea Utara kembali melakukan tindakan provokatif dengan menembakkan lebih dari 150 peluru ke sekitar Pulau Yeonpyeong dan menewaskan 4 orang warga Korea Selatan (dua orang tentara maritim dan dua orang warga sipil), belasan orang luka-luka, dan rusaknya beberapa rumah dan bangunan yang ada di pulau tersebut.

Pada tahun 2013, Korea Utara juga kembali menunjukkan sikap provokatif dan kengganannya dalam melakukan perjanjian damai (Klingner, 2015). Hal ini dapat terlihat dalam pernyataan *Korean People's Army* (KPA), yang mengancam akan mengabaikan perjanjian gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang mengakhiri Perang Korea pada tahun 1953, ketika dimulainya program latihan bersama antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai upaya pencegahan serangan nuklir. Pada akhir Maret 2013, KPA bahkan menyatakan bahwa senjata roket dan meriamnya berada dalam status siaga tertinggi yang akan siap untuk menyerang Hawaii, Guam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan apabila terjadi serangan terhadap Korea Utara.

Aksi-aksi provokasi yang terus dilakukan oleh Korea Utara setiap tahunnya tersebut memperlihatkan akan kecilnya kemungkinan bagi Korea Utara untuk bekerjasama dan melakukan denuklirisasi senjata nuklirnya. Meskipun disuatu waktu dapat tercapainya kesepakatan akan penghentian pengembangan senjata nuklir di Korea Utara, namun hal tersebut tidak dapat menjamin penghentian pengembangan nuklir di Korea Utara secara permanen. Hal ini dapat terlihat pada beberapa kasus upaya denuklirisasi pada tahun 2012 maupun 2018. Pada tahun 2012, Korea Utara menyetujui untuk menghentikan sementara pengembangan senjata nuklirnya, sebagai salah satu bentuk kesepakatan terhadap

bantuan makanan yang diberikan oleh Amerika Serikat (Nikitin, 2013). Namun, setelah adanya perselisihan dengan Amerika Serikat terkait dengan peluncuran roket pada April 2012, Korea Utara menyatakan pembatalan kesepakatan tersebut dengan melakukan uji coba peluncuran senjata nuklir pada Februari 2013 dan akan memulai kembali pengembangan senjata nuklirnya, termasuk di dalamnya pengembangan reaktor 5MW dan program pengayaan uranium di Yongbyon (Chanlett-Avery & Ian E. Rinehart, 2016).

Salah satu contoh krusial adalah kegagalan perundingan damai dan komitmen yang telah disepakati kedua belah pihak negara dalam Deklarasi Panmunjeom pada *North and South Korea Summit* di tahun 2018. Dalam Deklarasi Panmunjeom dapat terlihat beberapa komitmen yang ditekankan oleh kedua belah pihak negara sebagai upaya untuk mengakhiri peperangan, seperti komitmen untuk menghentikan siaran propaganda di wilayah-wilayah perbatasan kedua negara, menghentikan berbagai serangan militer, menormalisasi dan membangun Kantor Penghubung antar kedua negara di wilayah Kaesong, kerjasama dalam mewujudkan Semenanjung Korea menjadi wilayah bebas dari senjata nuklir, dan lain sebagainya (The Korea Times, 2018). Namun, penangguhan konflik serta komitmen perdamaian kembali mengalami kemunduran ketika pemerintah Korea Utara memutuskan untuk menutup dan menghancurkan jalur dan kantor penghubung kedua negara di Kaesong pada pertengahan tahun 2020 (Sebayang, 2020).

Pemutusan hubungan komunikasi antar kedua negara tersebut merupakan respon dari pemerintah Korea Utara yang menganggap tidak adanya upaya pemerintah Korea Selatan dalam menghentikan gerakan aktivis dan pembelot Korea Utara dalam penyebaran pesan-pesan kritis terhadap Kim Jongun selaku Presiden Korea Utara (Sebayang, 2020). Pemerintah Korea Utara bahkan dengan tegas menolak ajakan deklarasi perdamaian resmi yang diajukan oleh Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan pada pertengahan 2021 (Ray, 2021). Selain dari penolakan peresmian deklarasi damai, eskalasi agresivitas Korea Utara kembali terlihat dengan dilakukannya kembali uji coba peluncuran rudal balistik antar benua atau lebih dikenal dengan *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) pada 18 Februari 2023 ke wilayah Pantai Barat Jepang (VOA Indonesia, 2023). Sama seperti provokasi yang dilakukan Korea Utara sebelumnya, uji coba peluncuran ICBM ini secara tidak langsung menjadi bentuk protes Korea Utara dalam menanggapi latihan militer yang akan diadakan bersama dengan tentara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Dengan melihat runtutan kegagalan perundingan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terus berlangsung, serta agresivitas Korea Utara dalam merespon situasi yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan dan kepentingan nasionalnya, kemungkinan *payoff* DC maupun CC yang menempatkan Korea Utara untuk mengalah dan tunduk pada komitmen kerjasama yang ada akan cukup sulit. Hal ini terlihat dari berbagai kasus penyerang yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan upaya perundingan damai yang diusahakan selalu berakhir dengan kegagalan akibat sikap provokatif yang dilakukan oleh Korea Utara dengan terus melakukan uji coba senjata nuklirnya. Dalam pandangan Korea Utara, melakukan kerjasama (C) berarti melakukan denuklirisasi terhadap senjata-senjata nuklir yang dimilikinya. Sedangkan, senjata nuklir bagi Korea Utara merupakan satu-satunya sumber daya dan alat diplomasi yang dimilikinya untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Terlebih lagi dengan situasi dan kondisi adanya tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Korea Selatan yang dilihat sebagai ancaman atas keamanan nasional Korea Utara.

## **b. Analisa kemungkinan *pay off* CD dan DD**

Apabila didasarkan pada asumsi dasar urutan *pay off* yang ada dalam *Chicken Game Theory*, situasi CD dan DD merupakan dua hasil terburuk yang bisa didapatkan Korea Selatan dalam perseteruannya

dengan Korea Utara. Situasi CD dalam *Chicken Game Theory* ini menjadi pilihan ketiga terbaik dari hasil yang bisa didapatkan Korea Selatan. Sedangkan DD atau perang merupakan hasil terburuk yang dapat terjadi bagi kedua belah pihak negara. Dengan begitu, seharusnya kemungkinan yang paling memungkinkan bagi Korea Selatan dalam situasi ini adalah melakukan kerjasama atau mengalah (CD) untuk menghindari terjadinya Perang Korea kembali (DD). Namun, situasi yang terjadi saat ini memperlihatkan sebaliknya dimana pemerintah Korea Selatan bersikap *defensive* terhadap keamanan negaranya dengan terus meningkatkan tingkat keamanan nasionalnya.

Dilihat dari perspektif kaum realisme, *power* dan keamanan nasional merupakan hal utama yang menjadi kepentingan nasional suatu negara. Negara akan melakukan apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam upayanya untuk menjaga dan mempertahankan keamanan nasional negaranya. Untuk itu, sikap *defensive* yang dilakukan Korea Selatan menjadi suatu hal yang perlu dilakukan dalam melindungi keamanan nasionalnya. Meskipun pemerintah Korea Selatan mendorong kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antar kedua belah pihak negara, namun apabila Korea Utara tidak menunjukkan sikap akan adanya kemungkinan bekerja sama, Korea Selatan juga akan semakin mengintensifkan kerjasama militernya dengan Amerika Serikat dan pengembangan senjata pertahanan militernya. Dalam situasi dimana hasil kemungkinan yang dapat terjadi adalah DD, pemerintah Korea Selatan juga harus dapat mempersiapkan kelengkapan pertahanan militernya untuk dapat mengalahkan, atau setidaknya dapat mencegah serangan dari Korea Utara.

Pada Mei 2008, Korea Utara dikatakan telah memproduksi sekitar 38,5-kilogram senjata sekelas plutonium yang diekstrak dari bahan bakar bekas Batangan (NTI, 2016). Adapun beberapa proyek pengembangan reaktor nuklir oleh Korea Utara, yaitu (Nikitin, 2013):

Location	Type/Power Capacity	Status	Purpose
Yongbyon	Graphite-moderated Heavy Water Experimental Reactor/5 MWe	Currently shut-down; cooling tower destroyed in June 2009 as part of Six-Party Talks; estimated restart time would be 6 months; Re-start announced April 2013	Weapons-grade plutonium production
Yongbyon	Graphite-moderated Heavy Water Power Reactor /50 MWe	Never built; Basic construction begun; project halted since 1994	Stated purpose was electricity production; could have been used for weapons-grade plutonium production
Yongbyon	Experimental Light-Water Reactor/100 MWt (25-30 MWe)	U.S. observers saw basic construction begun in November 2010; Reactor dome emplaced on top of containment structure summer 2012	Stated purpose is electricity production; could be used for weapons-grade plutonium production
Taechon	Graphite-moderated Heavy Water Power Reactor/200 MWe	Never built; Basic construction begun; project halted since 1994	Stated purpose was electricity production; could have been used for weapons-grade plutonium production
Kumho District, Sinp'o	4 Light-water reactors/440 MW	Never built; part of 1985 deal with Soviet Union when North Korea signed the NPT; canceled by Russian Federation in 1992	Stated purpose is electricity production; could have been used for weapons-grade plutonium production
Kumho District, Sinp'o [KEDO Project]	2 Light-water reactors (turn-key)/1000 MWe	Never built; part of 1994 Agreed Framework, reactor agreement concluded in 1999; Project terminated in 2006 after North Korea pulled out of Agreed Framework	Electricity production

**Tabel 3. North Korean Nuclear Power Reactor Projects**

Sumber: CSR Report for Congress

Selain pengembangan senjata nuklir, pemerintah Korea Utara juga dengan intensif melakukan pengembangan teknologi senjata rudal balistik (Chanlett-Avery & Ian E. Rinehart, 2016). Meskipun mendapat kecaman internasional dan larangan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara tetap melakukan uji coba peluncuran rudal balistiknya pada tahun 2012 dan tahun 2014. Bahkan, pada tahun 2015, pemerintah Korea Utara mengungkapkan bahwa mereka tengah mengembangkan *Submarine-launched Ballistic Missile* (SLBM) dan mengumumkan peluncuran tes pertama SLBM ini pada bulan Mei 2015 (Chanlett-Avery & Ian E. Rinehart, 2016). Dengan intensitas pengembangan pembangunan senjata nuklir di Korea Utara, hal ini tentu menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan regional, khususnya keamanan nasional Korea Selatan.

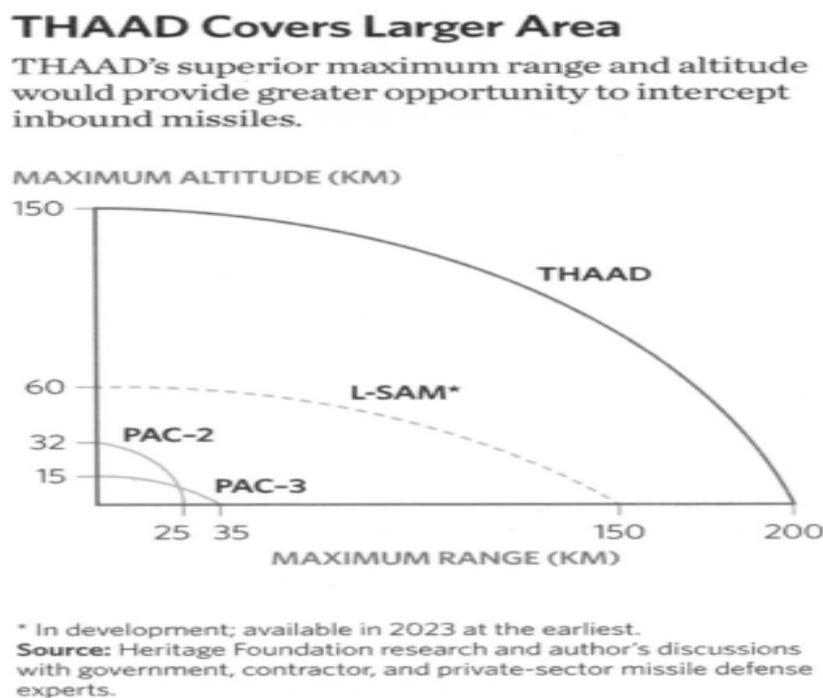
Berbeda dengan Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dan rudal balistik sebagai senjata militer pertahanannya, Korea Selatan tidak memiliki kapabilitas persenjataan nuklir dalam sistem pertahanan militernya, yang dapat mengalahkan, apalagi mencegah, serangan senjata nuklir ataupun rudal dari Korea Utara. Meskipun begitu, dalam upayanya untuk mencegah serangan senjata nuklir dari Korea Utara, Korea Selatan telah menjalin kerjasama militer dengan Amerika Serikat sejak tahun 1953 dan terus berupaya dalam meningkatkan pertahanan militernya dengan melakukan latihan militer bersama ataupun dengan melakukan pembelian perlengkapan pertahanan keamanan, seperti *missile interceptors* ataupun sistem *ballistic missile defense*, produksi Amerika Serikat (Manyin & Chanlett-Avery, 2015).

Pada tahun 2015, Korea Selatan dikabarkan tengah mengembangkan sistem pertahanannya sendiri, yang disebut sebagai *Korea Air and Missile Defense* (KAMD), yang dapat dibandingkan dengan sistem pertahanan PAC-2 yang produksi oleh Amerika Serikat (Klingner, 2015). Dalam perlengkapan militernya, Militer Angkatan Laut Korea Selatan telah memiliki tiga kapal penghancur, yang dilengkapi dengan *Aegis tracking software* meskipun tidak dilengkapi dengan *missile interceptors*, sedangkan militer angkatan darat Korea Selatan telah dilengkapi dengan PAC-2 *interceptors* sebagai senjata pertahanannya (Manyin & Chanlett-Avery, 2015).

Melihat semakin intensifnya pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara, pemerintah Korea Selatan juga seharusnya dapat selalu siaga terhadap sistem pertahanan negaranya. Ditambah lagi, dengan sikap provokasi Korea Utara yang tidak dapat diprediksi dengan jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan bahwa progress pengembangan rudal balistik Korea Utara berjalan dengan cukup signifikan dan diperkirakan akan terintegrasi secara penuh dalam waktu setahun sampai dengan tiga tahun mendatang (Kim, 2016). Menanggapi isu tersebut, Korea Selatan perlu melakukan tindakan pencegahan yang nyata dengan meningkatkan kapabilitas pertahanan keamanan negara mereka. Salah satunya adalah dengan melakukan penyebaran THAAD sebagai bagian dalam sistem pertahanan anti rudal, yang dikenal sebagai *Ballistic Missile Defense* (BMD).

*Terminal High Altitude Area Defence* (THAAD) merupakan sebuah sistem pertahanan untuk mencegah dan menghancurkan rudal balistik jarak pendek, menengah, maupun jauh di dalam basis wilayah sistem tersebut (Panda, 2016). Secara keseluruhan operasional sistem THAAD ini mirip dengan banyak sistem pencegat rudal dan *surface-to-air missile systems*, yang memiliki alat pemindai elektronik aktif yang dapat memindai radar rudal balistik dan secara otomatis akan menggunakan energi kinetiknya untuk menghancurkan rudal tersebut. (Panda, 2016). Sistem pertahanan THAAD ini dapat membuat perisai pertahanan berlapis-lapis untuk melindungi pasukan militer Korea Selatan, penduduk Korea Selatan, dan

target-target penting lainnya (Klingner, 2015). Dapat terlihat dalam gambar berikut, perbandingan jangkauan perisai pertahanan THAAD dengan beberapa sistem pertahanan lainnya, yaitu:



**Gambar 1. Jangkauan Perisai Pertahanan THAAD**

Sumber: Bruce Klingner, 2015

Oleh karena itu, akan sangat rasional bagi pemerintahan Korea Selatan untuk melakukan penyebaran sistem THAAD di wilayah negaranya sebagai upaya pencegahan serangan dari Korea Utara yang dapat terjadi kapan saja. Hal ini juga yang kemudian direfleksikan pada keputusan pemerintah Korea Selatan untuk melakukan aliansi kerjasama penyebaran THAAD dengan Amerika Serikat di tahun 2016. Sampai dengan tahun 2021, Sistem THAAD Korea Selatan telah didirikan di Lotte Skyhill Seongju Country Club dengan enam *launchers* yang dilengkapi dengan sistem radar, untuk dapat melindungi pangkalan militer yang terletak di wilayah Pyeongtaek, Busan, Ulsan, dan Pohang (Sukjoon, 2021). Mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh representasi *The Presidential Blue House*, THAAD merupakan alat pertahanan diri yang ditujukan untuk melindungi kehidupan dan keselamatan rakyat Korea Selatan dari ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Secara lebih lanjut pemerintah Korea Selatan dengan tegas menyatakan bahwa THAAD merupakan bagian dari kedaulatan keamanan negara yang tidak dapat dinegosiasikan (Ryall, 2022).

Klarifikasi pernyataan pemerintah Korea Selatan dalam menyikapi tiga permintaan dan respon pemerintah Tiongkok terkait dengan kebijakan penyebaran THAAD milik Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan, pada dasarnya, memperlihatkan kegigihan Korea Selatan untuk melindungi keamanan negaranya secara aktif (D). Dibandingkan melepas pakta kerjasama dengan Amerika Serikat (AS) – baik itu terkait penyebaran THAAD maupun tentara AS – di wilayah nasionalnya, Korea Selatan memilih untuk bersiaga dengan kemungkinan terburuk yang bisa didapatkan, yaitu kekalahan ataupun perang. Meskipun begitu, bukan berarti pemerintah Korea Selatan tidak melakukan upaya dalam mendapatkan *pay off* yang lebih baik (DC/CC), karena upaya perundingan damai yang dilakukan tidak mengurangi kesiapsiagaan militer nasional Korea Selatan dari serangan Korea Utara.

## Kesimpulan

Berakhirnya perang Korea pada tahun 1953 melalui gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak menjadikan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan membaik. Dengan situasi dan kondisi dimana Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya dan melakukan berbagai tindakan provokasi, pemerintah Korea Selatan juga harus mampu dalam membuat keputusan yang paling memungkinkan dan menguntungkan bagi keamanan nasional negaranya. Melihat pada perhitungan kemungkinan *pay off* dalam *Chicken Game Theory*, hasil terbaik yang bisa didapatkan Korea Selatan adalah kemenangannya dimana Korea Utara bekerjasama dengan menyetujui dilakukannya denuklirisasi dan bergabung dengan Korea Selatan dalam penyatuan wilayah (DC) ataupun situasi CC dimana kedua belah pihak negara sama-sama mengalah dan setuju untuk berdamai. Meskipun begitu, apabila melihat dari sikap dan tindakan provokasi yang terus dilakukan oleh Korea Utara, kemungkinannya kecil bagi Korea Utara saat ini untuk melakukan kerjasama, terlebih lagi mengalah dengan melakukan denuklirisasi. Untuk itu, hasil kemungkinan *pay off* DC ataupun CC untuk dapat terjadi juga menjadi semakin kecil.

Tidak berbeda jauh dengan Korea Utara, melihat sikap dan tindakan *defensive* yang dilakukan Korea Selatan pemerintah Korea Selatan juga tidak akan bersikap kooperatif terhadap Korea Utara ketika Korea Utara tidak menunjukkan adanya kemungkinan untuk dapat sama-sama melakukan kerja sama. Hal ini memperlihatkan bahwa, dalam konfliknya dengan Korea Utara, Korea Selatan akan lebih memilih situasi DD dibandingkan dengan CD. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi DD, Korea Selatan, sebagai negara yang tidak memiliki kapabilitas persenjataan nuklir, harus dapat meningkatkan sistem pertahanan negaranya, setidaknya, sampai pada tahapan dapat mencegah serangan nuklir ataupun rudal dari Korea Utara. Untuk itu, pemerintah Korea Selatan perlu untuk melakukan penyebaran sistem pertahanan THAAD sebagai upaya pencegahan dari serangan Korea Utara yang dapat terjadi kapan saja.

Melalui penjelasan sebelumnya, dapat terlihat adanya perbedaan pada hasil urutan *pay off* yang menjadi asumsi dasar *Chicken Game Theory* dengan hasil urutan *pay off* yang ada dalam perseteruan Korea Selatan dan Utara. Dalam perseteruan Korea Selatan dan Korea Utara ini, hasil urutan *pay off* yang terjadi adalah  $DC > CC > DD > CD$ , yang pada dasarnya urutan *pay off* ini merupakan asumsi dasar dalam teori *Prisoner's Dilemma*. Pada dasarnya urutan hasil *pay off* yang ada dalam *Prisoner's Dilemma* tidak berbeda jauh dengan asumsi dasar urutan *pay off* yang ada di dalam *Chicken Game Theory*. Sedikit perbedaannya terletak pada prioritas dua hasil *pay off* terburuk yang dapat terjadi pada suatu negara. Apabila dalam *Chicken Game Theory* hasil *pay off* terburuk yang dapat terjadi adalah DD, sebaliknya dalam *Prisoner's Dilemma* hasil *pay off* terburuk yang dapat terjadi adalah CD. Dalam struktur *Prisoner's Dilemma* ini dapat dikatakan bahwa suatu negara akan lebih memilih berperang dibandingkan untuk mengalah dari negara lainnya.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa konflik semenanjung korea antara Korea Selatan dan Korea Utara ini dilihat sebagai suatu permainan dimana kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada suatu negara adalah situasi DD, yang berartikan pecahnya kembali Perang Korea. Namun, apabila melihat situasi dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, mengalah bukan menjadi pilihan yang lebih baik buat mereka dibandingkan perang. Oleh karena itu, kedua belah pihak negara, sampai dengan saat ini terus bersiaga dan meningkatkan sistem pertahanan dan militer masing-masing negaranya.

## Daftar Pustaka

- Aljazeera. (2021, Maret 25). *Timeline: North Korea's weaponised diplomacy*. Retrieved from Aljazeera Website: <https://www.aljazeera.com/news/2021/3/25/timeline-north-koreas-weapons-tests-and-summitry>
- Berlinger, J., & Seo, Y. (2018, September 19). *North and South Korea commit to 'era of no war'*. Retrieved from CNN Website: <https://edition.cnn.com/2018/09/18/asia/north-korea-south-korea-summit-intl/index.html>
- Calder, K. E. (1996). *Segitiga Maut Asia: Bagaimana Persenjataan Energi dan pertumbuhan Mengancam Kestabilan Asia Pasifik*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Chanlett-Avery, E., & Ian E. Rinehart. (2016). *North Korea: US Relations, Nuclear Diplomacy, and International Situation*. Congressional Research Service (CSR) Report.
- Chul-Hwan, K. (2016, Juni 8). *Korea and the US to deploy THAAD in USFK*. Retrieved from The Korean Defense Daily: <http://www.mnd.go.kr/>
- Davis, D. L. (2021, November 2021). *America's diplomatic approach with North Korea is flawed. It's time to change tack*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/06/americas-diplomatic-approach-with-north-korea-is-flawed-its-time-to-change-tack>
- Forbes. (2021, Desember 31). *After 70 Years, North And South Korea Agree 'In Principle' To Formally End War*. Retrieved from Forbes Website: <https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/12/13/after-70-years-north-and-south-korea-agree-in-principle-to-formally-end-war/?sh=3f0f61f6252b>
- Haenle, P., & Sherman, A. (2016, September 12). *ttp://thediplomat.com/2016/09/the-real-answer-to-chinas-thaad-dilemma/*. Retrieved from the Diplomat: [ttp://thediplomat.com/2016/09/the-real-answer-to-chinas-thaad-dilemma/](http://thediplomat.com/2016/09/the-real-answer-to-chinas-thaad-dilemma/)
- Harris, P. (2015, Januari 5). *The National Interest: North Korea: The Axis of Evil's Last Man Standing*. Retrieved from The National Interest: <https://nationalinterest.org/feature/north-korea-the-axis-evil%E2%80%99s-last-man-standing-11958>
- IISS. (2016). *Asia-Pacific Regional Security Assesment 2016*. International Institute for Strategic Studies (IISS).
- John, K. (2005). *Veterans for Peace: Timeline of Nuclear Threats on the Korean Peninsula*. Retrieved from Veterans for Peace website: [https://www.veteransforpeace.org/files/2113/3348/4164/korea\\_timeline.pdf](https://www.veteransforpeace.org/files/2113/3348/4164/korea_timeline.pdf)
- Kim, C.-H. (2016, November 12). *THAAD is an effective measure that will deter the North Korean Nuclear Threat*. Retrieved from The Korean Defense Daily: <http://www.mnd.go.kr/>
- Klingner, B. (2015). *The Important of THAAD Missile Defense. Institute for National Security Strategy Vol. 29 No.2.*
- Lee, B. (2017). *THAAD DEPLOYMENT IN SOUTH KOREA. Harvard International Review, suppl. SPECIAL ISSUE; Cambridge Vol. 38, 34-37.*
- Manyin, M. E., & Chanlett-Avery, E. (2010). *US-South Korea Relations*. Congressional Research Service (CSR) Report for Congress.
- Manyin, M. E., & Chanlett-Avery, E. (2015). *US-South Korea Relations*. . Congressional Research Service (CRS) Report for Congress.
- Moore, G. J. (2008). *America's Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach. Asian Persoective, Vol. 32, No. 4, 9.*
- Nikitin, M. B. (2013). *North Korea's Nuclear Weapons: Technical Issues*. Congressional Research Service (CSR) Report for Congress.
- NTI. (2016, November 13). *North Korea: Nuclear Section*. Retrieved from NTI website: <http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/>
- Panda, A. (2016, Februari 25). *The Diplomat: What is THAAD, What Does It Do, and Why Is China Mad About It?* Retrieved from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2016/02/what-is-thaad-what-does-it-do-and-why-is-china-mad-about-it/>

- Ray, S. (2021, Desember 13). *After 70 Years, North And South Korea Agree 'In Principle' To Formally End War*. Retrieved from Forbes Website: <https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2021/12/13/after-70-years-north-and-south-korea-agree-in-principle-to-formally-end-war/?sh=3f0f61f6252b>
- Reuters. (2016, Oktober 1). *China paper says U.S., South Korea will 'pay the price' for planned missile system*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-china-idUSKCN1212XH>
- Ryall, J. (2022, Agustus 25). *South Korea faces pressure from China on THAAD*. Retrieved from Deutsche Welle (DW) Website: <https://www.dw.com/en/south-korea-confronts-chinese-pressure-over-anti-missile-weapons-system/a-62921470>
- Sankaran, J. (2017). Missile defense and strategic stability: Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea. *Contemporary Security Policy Vol. 38, Issue 3*.
- Sebayang, R. (2020, Juni 18). *Korea Utara-Selatan: Perang, Baik, Putus Hubungan*. Retrieved from CNBC Indonesia Website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200618153441-4-166325/korea-utara-selatan-perang-baik-putus-hubungan>
- Seok-Jong, L. (2016, November 12). *Korea – US establishes a principle of operation against North Korea*. Retrieved from The Korean Defense Daily: <http://www.mnd.go.kr/>
- Stone, R. W. (2001). The Use and Abuse of Game Theory in International Relations. *Journal of Conflict Resolution, Vol. 45 No. 2*, 216-244.
- Sukjoon, Y. (2021, May 10). *The Diplomat: Asia Defense*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2021/05/upgrading-south-korean-thaad/>
- Sukjoon, Y. (2021, Mei 10). *Upgrading South Korean THAAD*. Retrieved from The Diplomat Website: <https://thediplomat.com/2021/05/upgrading-south-korean-thaad/>
- The Korea Times. (2018). *Panmunjeom Declaration*. Retrieved from The Korea Times: [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/04/731\\_248077.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/04/731_248077.html)
- VOA Indonesia. (2023, Februari 19). *Korea Utara Konfirmasi telah Uji Coba Nuklir ICBM*. Retrieved from VOA Indonesia Website: <https://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-konfirmasi-telah-uji-coba-nuklir-icbm-/6969406.html>
- Wit, J. S., & Ahn, S. Y. (2015). North Korea's Nuclear Future: Technology and Strategy. *America: US-Korea Institute at SAIS*, 2-4; <http://www.jstor.org/stable/resrep11152.1>.